



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENGHUBUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SARIDO ,
2. Jabatan : KEPALA BADAN PENGHUBUNG
3. NHK : 475419

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 590.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 168.500.000

1. MOTOR, YAMAHA RX KING Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOTOR, YAMAHA FREEGO MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOBIL, MITSUBISI XPANDER MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 3.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 28.088.876

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 789.588.876

III. HUTANG

Rp. 379.041.667

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 410.547.209

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.